

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Upah Minimum Regional

1. Pengertian Upah

Menurut Hasibuan upah adalah sejenis balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya.¹ Namun dalam kaitannya dengan pembahasan kali ini kedalam pengertian upah hanya akan dimasukkan pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan termasuk tunjangannya, sekedar tunjangan itu tidak termasuk tunjangan jaminan sosial.²

Beberapa teori yang perlu diperhatikan yaitu teori yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan upah. Teori-teori tersebut adalah :

a. Teori Upah Normal, oleh David Ricardo

Menurut teori ini, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengongkosi segala keperluan hidup buruh dan tenaga kerja. Teori ini menegaskan kepada buruh, bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya demikian, karena memang demikian saja kemampuannya majikan.

b. Teori Undang-Undang Upah Besi, oleh Lassale

Menurut teori ini upah normal di atas hanya memenangkan majikan saja, oleh karena itu menurut teori ini buruh harus berusaha menentangnya (menentang teori upah normal itu) agar ia dapat mencapai kesejahteraan hidup.³

¹ M. Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 123.

² Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012 hlm. 86.

³ *Ibid.*, hlm. 88

c. Teori Dana Upah, oleh Stuart Mill Senior

Menurut teori dana upah buruh tidak perlu menentang seperti yang disarankan oleh teori Undang-Undang upah besi, karena upah yang diterimanya itu sebenarnya adalah berdasarkan kepada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana ini jumlahnya besar maka akan pula upah yang diterima meningkat, sebaliknya kalau dana itu berkurang maka jumlah upah yang diterima buruh pun akan berkurang. Menurut teori ini yang akan dipersoalkan sebenarnya bukan seberapa besar upah yang diterima buruh, melainkan sampai seberapa jauhnya upah tersebut mampu mencukupi segala keperluan hidup beserta keluarganya. Karena menurut teori ini dianjurkan bahwa khusus untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya disediakan dana khusus oleh majikan atau Negara yang disebut dana anak-anak.⁴

2. Jenis-Jenis Upah

Tentang jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai kepustakaan hukum perburuhan dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Upah Nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.⁵

b. Upah Nyata

Yang dimaksud dengan upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang buruh yang berhak.

⁴ *Ibid.*, hlm. 89

⁵ *Ibid.*, hlm. 89

Upah nyata ini ditentukan oleh daya upah tersebut yang akan banyak tergantung dari :

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
- 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan ⁶

c. Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.⁷

d. Upah Minimum

Upah minimum yaitu upah terendah yang akan dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh yang bekerja diperusahaannya. Upah minimum ditentukan oleh pemerintah dan setiap tahunnya dapat berubah sesuai dengan keadaan.⁸

e. Upah Wajar

Upah wajar maksudnya adalah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara minimum dan upah hidup, sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu :

- 1) Kondisi Negara pada umumnya
- 2) Nilai upah rata di daerah dimana perusahaan itu berada
- 3) Peraturan perpajakan
- 4) Standar hidup para buruh itu sendiri
- 5) Undang-undang mengenai upah khususnya
- 6) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian Negara

⁶ *Ibid.*, hlm. 89

⁷ *Ibid.*, hlm. 89-90

⁸ *Ibid.*, hlm. 90

- 7) Dari keenam jenis upah tersebut diatas yang diharapkan oleh buruh kita saat ini adalah upah wajar, bukan upah hidup. Untuk itu untuk mengharapkan upah hidup untuk saat ini belum memungkinkan karena kondisi perusahaan di Negara kita umumnya masih belum begitu besar.⁹

3. Menentukan Tingkat-Tingkat Penggajian Upah

Kompensasi karyawan merujuk kepada semua bentuk bayaran atau imbalan dan berasal dari pekerjaan mereka dan memiliki dua komponen utama :

- a. Upah langsung

Yaitu pembayaran dalam bentuk gaji, insentif, komisi dan bonus

- b. Upah tidak langsung

Yaitu pembayaran dalam bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi.¹⁰

4. Proses Penentuan Upah

Rivai mengemukakan bahwa salah satu aspek yang sangat penting dalam penentuan upah adalah jumlah upah yang diterima karyawan harus memiliki *internal equity* dan *external equity*. *Internal equity* adalah jumlah yang diperoleh dipersepsi sesuai dengan input yang diberikan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan. *External equity* adalah jumlah yang diterima dipersepsi sesuai dengan input yang diberikan dibandingkan dengan pekerjaan yang sejenis diluar organisasi. Oleh karena itu, untuk mengusahakan adanya *equity*, penentuan upah oleh perusahaan dapat ditempuh

⁹ *Ibid.*, hlm. 90-91

¹⁰ Gary Dessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Sembilan Jilid 2*, Indeks, Jakarta, 2005, hlm. 72.

dengan menganalisis jabatan/tugas, mengevaluasi jabatan, melakukan survei upah, dan menentukan tingkat upah.¹¹

5. Syarat Upah yang Adil

- a. Sesuai dengan prestasi kerja, untuk mengukur prestasi kerja, dewasa ini telah dikembangkan berbagai evaluasi jabatan
- b. Sesuai dengan kebutuhan karyawan, artinya cukup untuk hidup layak dengan keluarganya. Untuk hidup layak tidak ada suatu ukuran umum tetapi paling sedikit harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, terutama dalam inflasi dan harga-harga naik.
- c. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jika suatu perusahaan memang tidak mampu membayar upah tinggi, maka upah rendah sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar cukup tinggi padahal upah yang dibayar itu rendah berarti melanggar keadilan dan moral pancasila.
- d. Sesuai situasi dan kondisi setempat. Maksudnya sesuai perekonomian daerah masing-masing.¹²

6. Tujuan Pemberian Upah

Pemberian dan penentuan jumlah upah yang layak memiliki beberapa tujuan. Secara umum tujuan dari pemberian upah sebagai berikut :

- a. Memberikan hak karyawan

Upah harus diberikan karena merupakan hak karyawan atas usahanya dalam bekerja. Sehingga dalam hal ini pemberian upah merupakan kewajiban setiap pengusaha maupun pengusaha kepada karyawannya.

¹¹ Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 759

¹² Gilarsu T., *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro Edisi Revisi*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 218

b. Memberikan rasa keadilan

Pemberian upah dilakukan secara terbuka dan penentuan besarnya kompensasi didasarkan kepada kinerjanya. Penentuan upah dilakukan tanpa ada diskriminasi dan apa adanya sehingga akan memberikan rasa keadilan terhadap semua pegawai, sehingga semangat dan motivasi kerja karyawan akan meningkat.¹³

c. Memperoleh karyawan yang berkualitas

Dengan pemberian upah yang sesuai maka akan menarik pelamar yang berkualitas untuk melamar ke perusahaan. Pelamar yang memiliki kualifikasi yang tinggilah yang paling banyak melamar. Sebaliknya jika upah tidak sesuai maka akan memperoleh karyawan yang tidak berkualitas.¹⁴

d. Mempertahankan karyawan

Dengan adanya pemberian upah yang layak akan mengurangi adanya karyawan yang keluar, sehingga karyawan akan bekerja secara maksimal sesuai dengan job kerja masing-masing.

e. Mematuhi peraturan pemerintah

Pemberian upah yang sesuai dengan kebijakan pemerintah berarti mendukung program pemerintah. Dengan mematuhi peraturan pemerintah tersebut akan terhindar dari sanksi yang mungkin terjadi.¹⁵

f. Menghindari konflik

Jika upah yang dibayarkan sesuai aturan yang berlaku, layak dan wajar maka tidak akan menimbulkan konflik yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan secara keseluruhan.¹⁶

¹³ Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.236

¹⁴ *Ibid.*, hlm.236

¹⁵ *Ibid.*, hlm.237

¹⁶ *Ibid.*, hlm.238

7. Upah Minimum Regional

Pemerintah di banyak Negara selalu berusaha melindungi kelompok yang lemah yaitu para buruh dalam hubungan kerja mereka dengan para pengusaha. Untuk melindungi para buruh pemerintah menentukan Undang-Undang suatu tingkat upah minimum yang boleh dibayar oleh pengusaha kepada pekerjanya. Tingkat upah minimum untuk suatu daerah disebut tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan ini berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Upah Minimum Regional (UMR) ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KLH), indeks harga konsumen, upah minimum yang berlaku secara regional kemampuan dan tingkat perkembangan perusahaan. Ketentuan UMR seharusnya tidak boleh terlalu jauh menyimpang dari tingkat upah rata-rata yang terjadi dipasar tenaga kerja sebab jika UMR telalu tinggi maka pengusaha akan sangat berhati-hati dalam memilih tenaga kerja yang digunakan, tenaga kerja akan dipilih yang memang benar-benar produktif dan efisien. Sehingga sebagai akibatnya UMR yang sangat tinggi tersebut akan menimbulkan pengangguran dan UMR hanya melindungi mereka yang sudah bekerja.¹⁷

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.¹⁸

¹⁷ Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro*, BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 184-185

¹⁸ Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 99-100.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 30 menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁹

Terkait dengan pengupahan, pemerintah melakukan intervensi karena sangat berkepentingan untuk menyelaraskan antara upah yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pencapaian produktivitas kerja. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan kebijakan penetapan upah minimum yang dilandasi oleh kebutuhan fisik minimum (KFM) berkembang menjadi kebutuhan hidup minimum (KHM), yang berlaku secara mikro regional dengan maksud :

- 1) Sebagai jaring pengaman
- 2) Sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup kelompok terendah
- 3) Sebagai alat terjadinya pemerataan pendapatan
- 4) Pemberian upah di atas upah minimum diatur secara internal di perusahaan.²⁰

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 01/MEN/1999 bab I pasal 1 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum yang berlaku sektoral di daerah Kabupaten/Kotamadya menurut wilayah pembangunan daerah disebut dengan upah minimum sektoral regional tingkat II. Upah minimum

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 100

²⁰ *Ibid.*, hlm. 100-101

ditetapkan berdasarkan standar layak hidup dengan memperhatikan produktivitas pertumbuhan ekonomi.²¹

Berikut ini merupakan data Upah Minimum Regional Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2011-2015 yang mengalami kenaikan.

Tabel 2.1
Daftar Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah

Tahun	UMR
2011	675.000
2012	765.000
2013	830.000
2014	910.000
2015	910.000

Sumber : www..bps.go.id, tahun 2018 (data diolah)

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan dan meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah. Sedangkan secara makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja, perubahan struktur biaya industri sektoral, peningkatan produktivitas kerja nasional, peningkatan etos dan disiplin kerja, dan memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan *bipartite*. Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk regional atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan otonomi daerah,

²¹ Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 172-173

kemudian mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh masing-masing provinsi.²²

Selain itu, kebijakan pemerintah tentang penetapan upah minimum secara Makro Nasional adalah bertujuan untuk meningkatkan:

- 1) Pemerataan pendapatan, karena kenaikan upah minimum akan mempersempit kesenjangan upah pekerja terendah dan upah pekerja tertinggi.
- 2) Daya beli pekerja, karena kenaikan upah minimum akan secara langsung meningkatkan daya beli pekerja, dan selanjutnya akan mendorong lajunya ekonomi rakyat.
- 3) Perubahan struktur biaya, karena kenaikan upah minimum secara otomatis akan memperbaiki struktur upah terhadap biaya produksi.
- 4) Produktivitas nasional, karena kenaikan upah minimum akan memberikan insentif bagi pekerja untuk bekerja lebih giat untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan, dan berkelanjutan secara nasional.
- 5) Etos dan disiplin kerja, karena dengan terpenuhinya kebutuhan minimumnya pekerja akan berkonsentrasi dan tenang dalam bekerja sehingga akan meningkatkan semangat dan disiplin pekerja.²³

8. Undang-Undang Mengenai Upah

Sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya upah kerja atau gaji haruslah memenuhi kelayakan hidup minimal yang harus dipenuhi. Untuk itu dalam mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan

²² Syahrina Syam dan Abdul Wahab , *Pengaruh Upah dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar*, No.1, Vol. 1, 2015, hlm. 38

²³ Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari, *Op.Cit.*, hlm. 102

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja.²⁴ Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan pakar. Peraturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Pemenuhan atas upah yang layak bagi penghidupan dan kemanusiaan merupakan konsep pengupahan yang berlaku di Indonesia secara konstitusional. Oleh sebab itu, Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memaknai upah sebagai dasar yang harus dipenuhi pengusaha. Apabila pengusaha tidak membayar upah pekerja, maka merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat dipidana.²⁶

9. Upah dalam Pandangan Islam

Sistem pengupahan dalam Islam sudah ada semenjak masa Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum Muslimin setelahnya, yakni penentuan upah bagi para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah bersabda : “Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya.” Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja.²⁷ Di dalam islam

²⁴ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 256

²⁵ *Ibid.*, hlm. 259

²⁶ Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari, *Op. Cit.*, hlm.100

²⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.113

juga diatur mengenai dasar penentuan upah. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يظَلْمُونَ ١٩

Artinya : “dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Al-Ahqaf (46):19).

Menurut Tanjung, upah dalam Islam dikaitkan dengan imbalan yang diterima oleh seseorang yang bekerja, baik imbalan dunia (finansial dan nonfinansial), maupun imbalan akhirat (pahala sebagai investasi akhirat). Ditegaskan dalam Qs. At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dari ayat Al-Qur'an diatas dapat didefinisikan bahwa upah adalah imbalan materi yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi (didunia) dan dalam bentuk imbalan pahala (di akhirat) secara adil dan layak.

Konsep upah dalam antara barat dan Islam menurut Henri Tanjung sebagai berikut:²⁸

No	Aspek	Barat	Islam
1	Keterkaitan yang erat antara upah dan moral	Tidak	Ya
2	Upah memiliki dua dimensi : dunia dan akhirat	Tidak	Ya
3	Upah diberikan berdasarkan prinsip keadilan	Ya	Ya
4	Upah diberikan berdasarkan prinsip kelayakan	Ya	Ya

Sumber : Abu Fahmi, dkk., *HRD Syariah Teori dan Implikasi*, 2014

Upah sebenarnya akan bergerak di antara batas tingkat upah minimum dan tingkat upah maksimum. Perubahan ini dipengaruhi

²⁸ Abu Fahmi, dkk., *HRD Syariah Teori dan Implikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm.186-187

oleh permintaan pekerja dan ketersediaan lapangan kerja, dan juga standar biaya hidup sehari-hari pekerja. Dan jika suatu upah telah berada dibawah tingkat upah minimum atau diatas upah maksimum, maka pemerintah wajib untuk campur tangan dalam penentuan tingkat upah. Tujuannya agar tidak terjadi konflik yang akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan pada akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat. Menurut Rahman, untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai Islam dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja.
- b. Memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendaki dan sesuai dengan keahliannya. Jadi tanpa adanya batasan yang menimbulkan kesulitan dalam pemilihan pekerjaan.²⁹

Didalam Islam prinsip mengenai upah hampir sama dengan prinsip yang ada didalam UU Ketenagakerjaan mengenai pemberian upah. Jadi upah yang diberikan kepada pekerja haruslah sesuai dengan standar kehidupan yang layak, sehingga pentingnya ditetapkan upah minimum regional agar pekerja dapat sejahtera.

B. Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan hampir ada di setiap Negara. Pada dasarnya pengangguran tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena sebaik dan hebatnya suatu Negara maupun daerah dalam menangani perekonomiannya, tetap saja pengangguran itu ada. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kategori

²⁹ Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 243

orang yang menganggur adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Usia kerja biasanya adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tapi diatas usia anak-anak (relatif diatas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD- tamat SMA).³⁰

Menurut Sadono Sukirno pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sedangkan seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak digolongkan sebagai penganggur. Pengangguran juga dapat memberikan dampak sosial yang tidak baik misalnya semakin meningkatnya tindakan kriminal dan pelanggaran moral.³¹

Pengangguran pada prinsipnya mengandung arti hilangnya output (*loss of output*) dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja (*human misery*) dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumber daya ekonomi. Disamping memperkecil output, pengangguran juga memacu pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan. Pengukuran pengangguran di dalam suatu negara biasanya digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran (*unemployment rate*), yaitu jumlah penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja (*labor force*). Angka pengangguran menurut Sumarsono dalam Zarkasi adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak sedang mempunyai pekerjaan disebut penganggur. Sedangkan angkatan kerja

³⁰ Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro, Edisi ke-5*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm. 426-427

³¹ Nur Baeti, *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*, *Economics Development Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang, ISSN 2252-6889, 2013, hlm. 92

itu sendiri adalah jumlah orang yang bekerja dan tidak bekerja yang berada dalam kelompok umur tertentu.³²

Berdasarkan kajian teori mengenai pengangguran, dalam penelitian ini pengangguran yang dimaksud adalah pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik. Pengangguran terbuka merupakan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai untuk bekerja, dan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan sekaligus tidak mencari pekerjaan. Perhitungan dapat dilakukan dengan rumus TPT (tingkat pengangguran terbuka) yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.³³ Perhitungan dengan formula publikasi BPS.³⁴

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

Pengangguran juga erat kaitannya perkembangan penduduk dan kesempatan kerja, jika kedua hal tersebut tidak disiasati dengan tepat maka muncul berbagai dampak yang bersifat negatif, baik terhadap kestabilan ekonomi maupun terhadap kestabilan sosial dan politik. Istilah pengangguran selalu dikaitkan dengan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari penduduk yang berusia antara 15 s/d 65 tahun, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja, serta sedang mencari pekerjaan. Meskipun demikian tidak semua orang yang berusia 15 s/d 65 termasuk angkatan kerja, karena mereka tidak mau bekerja. Misalnya orang yang tidak memerlukan pekerjaan karena sudah mempunyai kekayaan yang banyak, ibu rumah tangga dan orang yang masih sekolah atau kuliah. Demikian yang disebut angkatan kerja dapat digolongkan sebagai berikut :

³² Zarkasi, *Pengaruh Pengangguran Terhadap Daya Beli Masyarakat Kalbar*, Jurnal Khatulistiwa, No. 1, Vol. 4 , 2014, hlm. 49-50

³³ www.jateng.bps.go.id (25 Mei 2018)

³⁴ Zarkasi, *Pengaruh Pengangguran Terhadap Daya Beli Masyarakat Kalbar*, Jurnal Khatulistiwa, No. 1, Vol. 4 , 2014, hlm. 50

- a. Bekerja (*employed*), semua orang yang mempunyai pekerjaan dan bekerja apa saja sehingga dapat memperoleh penghasilan.
- b. Tidak bekerja (*unemployed*), orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan, tapi sedang bekerja mencari pekerjaan.³⁵
- c. Pengangguran adalah orang-orang yang usianya berada dalam usia angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan.³⁶

2. Jenis-Jenis Pengangguran

a. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

1) Pengangguran Normal (Friksional)

Pengangguran normal merupakan pekerja yang sedang berhenti dari tempat kerjanya dan sedang mencari tempat kerja yang baru, sehingga pekerja tersebut untuk sementara menjadi penganggur.³⁷

Terdapat tiga golongan penganggur yang dapat diklasifikasikan sebagai pengangguran friksional :

a) Tenaga kerja yang baru pertama sekali kerja

Setiap tahun terdapat golongan penduduk yang mencapai usia yang tergolong sebagai angkatan kerja. Di samping itu pelajar dan sarjana yang baru menyelesaikan pelajarannya juga akan secara aktif mencari kerja.

b) Pekerja yang meninggalkan kerja dan mencari kerja baru

Ketika perekonomian mencapai tingkat kegiatan yang sangat tinggi terdapat perusahaan yang menghadapi masalah untuk mendapatkan pekerja. Sehingga akan mendorong orang-orang yang sedang bekerja untuk meninggalkan pekerjaannya, untuk mencari pekerjaan

³⁵ Asfia Murni, *Ekonomika Makro Edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.197

³⁶ *Ibid.*, hlm.. 198

³⁷ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 199

yang lebih tinggi sesuai dengan pribadinya atau untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi.

c) Pekerja yang memasuki lagi pasaran buruh.

Terdapat golongan yang dahulu telah bekerja tetapi meninggalkan angkatan kerja, memutuskan untuk bekerja kembali.³⁸

2) Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Saat kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan produksi. Dalam pelaksanaannya berarti jam kerja dikurangi, mesin produksi tidak digunakan dan sebagian tenaga kerja diberhentikan. Sehingga akan menaikkan tingkat pengangguran.³⁹

3) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan atau perkembangan teknologi dalam kegiatan ekonomi, sehingga terjadi perubahan struktur kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, sebagian pekerja terpaksa harus di PHK dan menjadi penganggur.⁴⁰

4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi merupakan pengangguran akibat adanya alih teknologi yaitu adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Seperti adanya mesin akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia serta

³⁸ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 476

³⁹ Prathama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Edisi 3*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 196-197

⁴⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi 3*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 329

adanya robot yang menggantikan kerja manusia. Sehingga pengangguran akibat penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.⁴¹

b. Pengangguran Berdasarkan Cirinya

1) Pengangguran terbuka

Merupakan penganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Hal tersebut dikarenakan kegiatan ekonomi yang menurun dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja atau akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.⁴²

2) Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh banyaknya jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan kelebihan tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja ini yang termasuk dalam pengangguran tersembunyi.⁴³

3) Pengangguran musiman

Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang dipengaruhi oleh perubahan musim, biasanya bersifat sementara dan terjadi dalam jangka pendek secara berulang-ulang.⁴⁴

4) Setengah menganggur

Setengah menganggur merupakan seseorang yang hanya bekerja dengan jam kerja jauh lebih rendah dibandingkan waktu normal, atau hanya bekerja beberapa kali saja dalam seminggu. Sehingga pekerja tersebut dapat dikatakan setengah.⁴⁵

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 329

⁴² *Ibid.*, hlm. 330

⁴³ *Ibid.*, hlm. 330

⁴⁴ Asfia Murni, *Loc., Cit.* hlm. 200

⁴⁵ Sadono Sukirno, *Op.Cit.*, hlm. 330-331

Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Dan tingkat pengangguran ini dapat mempengaruhi nilai IPM.⁴⁶

3. Faktor-Faktor Penyebab Pengangguran

a. Faktor Demografis

Kenaikan tingkat kelahiran akan menyebabkan kenaikan jumlah para pekerja muda, namun para pekerja muda juga memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi ketika para generasi angkatan kerja memasuki angkatan kerja. Tetapi faktor demografi ini tidak termasuk faktor yang berpengaruh secara signifikan.⁴⁷

b. Faktor Pergeseran Sektoral

Semakin besar jumlah realokasi sektoral, maka semakin besar pula tingkat pemutusan hubungan kerja dan semakin tinggi tingkat pengangguran. Seperti pada penggantian bahan bakar minyak tanah menjadi gas elpiji, karena adanya kebijakan pemerintah dan tingginya harga minyak tanah. Dengan adanya pergantian tersebut menuntut realokasi tenaga kerja dari sektor minyak tanah sehingga menyebabkan banyak terjadi pengangguran.⁴⁸

c. Produktivitas

Didalam teori standar pasar tenaga kerja, produktivitas yang tinggi menunjukkan peningkatan permintaan tenaga kerja dan upah riil yang lebih tinggi. Namun apabila terjadi perubahan tingkat produktivitas dari tinggi ke rendah akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan penambah jumlah pengangguran.⁴⁹

⁴⁶ Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, *Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*, Jurnal Ekonomi, Universitas Riau, No. 2, Vol. 22, 2014, hlm. 11

⁴⁷ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi Edisi 6*, Erlangga, Jakarta, 2006, 2006, hlm. 169

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 169

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 169

4. Dampak Pengangguran

Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan berbagai dampak yang bersifat negatif, baik terhadap kestabilan ekonomi maupun terhadap kestabilan social dan politik.⁵⁰ Dampak terhadap kestabilan ekonomi, pengangguran dapat mengganggu stabilitas perekonomian yaitu akan menurunkan atau melemahkan *Aggregate Demand* (AD) dan *Aggregate Supply* (AS). Dampak buruk pengangguran terhadap perekonomian dapat dilihat dari hal-hal berikut:

- a. Tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, karena mereka kehilangan mata pencaharian
- b. Pertumbuhan ekonomi turun, karena daya beli masyarakat turun akan menimbulkan pengusaha lesu untuk berinvestasi
- c. Penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak berkurang, karena tingkat ekonomi rendah
- d. GNP aktual yang dicapai lebih rendah dari GNP potensial, karena faktor produksi tidak dimanfaatkan secara optimal.⁵¹

Selain itu pengangguran juga mempunyai dampak terhadap kestabilan sosial dan politik. Pengangguran yang tinggi akan menimbulkan hal-hal berikut :

- 1) Berbagai masalah sosial dalam kehidupan seperti kriminalitas. Kejadian tingkat pengangguran yang sangat tinggi berpengaruh terhadap aspek psikologis atau beban perasaan yang tidak dapat terkendalikan.
- 2) Berbagai masalah politik, misalnya timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa.⁵²

5. Pengangguran dalam Perspektif Islam

Menurut Imam Syaibani kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja

⁵⁰ Asfia Murni, *Op. Cit.*, hlm. 200-201

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 201

⁵² *Ibid.*, hlm. 201

sebagai unsur produksi didasari konsep *istikhlaf*, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia. Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan *ikhtiar* yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Dalam Islam, kerja adalah suatu prinsip bahwa setiap orang Islam diperintahkan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja akan menempatkan dirinya bergantung pada bantuan orang lain, yang berarti menempatkan tangan mereka dibawah tangan-tangan yang lain.⁵³

Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung mengenai pengangguran menurut Islam, tetapi dalam Al-Qur'an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini adalah untuk bekerja keras mencari penghidupan masing-masing. Sehingga didalam Islam terdapat peringatan agar manusia tidak menganggur, Allah berfirman dalam QS. An-Naba ayat 4 :

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝ ١١

Artinya : “dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”.

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa dijadikannya siang untuk mencari penghidupan. Ini menunjukkan supaya manusia hendaknya bekerja untuk menanggung segala kebutuhannya dalam perjuangannya untuk mencapai kemajuan..⁵⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam islam juga melarang seseorang untuk menjadi pengangguran dan tidak bekerja.

⁵³ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan dan Teoretis*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 227.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 228

Menurut Qardhawi, pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

a. Pengangguran *Jabariyah* (terpaksa)

Adalah pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya atau seseorang telah mempunyai suatu keterampilan tetapi keterampilan ini tidak berguna sedikitpun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.

b. Pengangguran *khiyariyah*

Seseorang yang memilih menganggur padahal pada dasarnya mampu untuk bekerja.

Ada pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan erat dengan solusi yang ditawarkan Islam untuk mengatasi suatu pengangguran. Kelompok pengangguran *jabariyah* perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar mereka dapat bekerja. Sebaliknya Islam tidak mengalokasikan dana dan bantuan untuk pengangguran *khiyariyah* karena pada prinsipnya mereka memang tidak memerlukan bantuan karena pada dasarnya mereka mampu untuk bekerja hanya saja mereka malas untuk memanfaatkan potensinya dan lebih memilih menjadi beban bagi orang lain.⁵⁵

C. Produk Domestik Regional Bruto

1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian regional (daerah). Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau

⁵⁵ *Ibid.*, 229

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian daerah, baik yang dilakukan oleh warga lokal maupun warga asing yang bermukim di negara bersangkutan. Sehingga, ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala provinsi atau kabupaten/kota.⁵⁶ PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.⁵⁷ Menurut Todaro salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output per kapita. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi mengubah pola konsumsi karena peningkatan daya beli. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan IPM karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan.⁵⁸

Menurut Hadi Sasana, PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. PDRB merupakan penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender).

Menurut Widodo, PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau

⁵⁶ Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, dan Suprpto, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Volume 18, Nomor 4, 2014, hlm. 456

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Jawa Tengah 2011-2015*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Semarang, t.th., hlm. 3

⁵⁸ Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, dan Suprpto, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Volume 18, Nomor 4, 2014, hlm. 454

merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar.⁵⁹

PDRB menurut Saberan, PDRB adalah nilai tambah yang mampu diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah PDRB merupakan gabungan dari empat kata. Pertama adalah produk yang berarti seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa. Kedua adalah domestik yang berarti perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan. Ketiga adalah regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan. Terakhir adalah bruto yang bermakna perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.⁶⁰

2. Macam-Macam Produk Domestik Regional Bruto

a. PDRB atas dasar harga berlaku

Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

⁵⁹ I Made Parwata, I Wayan Swendra, Fridayana Yudiaatmaja, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan”, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja E-Journal Bisma, Volume 4, 2016.

⁶⁰ Yayuk Eko Wahyuningsih dan Zamzami, “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya”, Universitas Teuku Umar, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, ISSN. 2442-7411 Volume 1 Nomor 1 Mei 2014

b. PDRB atas dasar harga konstan.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).⁶¹

3. Pendekatan dalam Penyusunan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya (pengeluaran).⁶²

a. PDRB menurut lapangan usaha (produksi)

PDRB menurut pendekatan lapangan usaha (produksi) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).⁶³ Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan

⁶¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Jawa Tengah 2011-2015*, Loc., Cit.

⁶² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Jawa Tengah 2011-2015*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Semarang, t.th., hlm. xiii

⁶³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Jawa Tengah 2011-2015*, Op, Cit., hlm. 3

akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya.⁶⁴

b. PDRB menurut pengeluaran

Yaitu dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi suatu wilayah pada periode tertentu. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).⁶⁵

4. Kegunaan PDRB

- a. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar begitu juga sebaliknya.
- b. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
- c. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 4

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 4

- suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/ daerah.
- d. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi
 - e. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri maupun luar wilayah.
 - f. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk
 - g. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.⁶⁶

5. PDRB dalam Perspektif Islam

Menurut Tariqi, pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.⁶⁷ Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak sekedar terkait dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran pencapaian keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, social dan kemasyarakatan. Namun jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak tercapai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi :

- a. *Investible resources* (SDA yang dapat diinvestasikan)

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 5

⁶⁷ Nurul Huda dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm. 124

- b. SDM dan *entrepreneurship*
- c. Teknologi dan inovasi ⁶⁸

Investible resources merupakan segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. SDM dan *entrepreneurship* merupakan sumber daya yang digunakan sebagai penggerak sektor riil dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pentingnya SDM dan *entrepreneurship* yang berkualitas untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi. Teknologi dan inovasi merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi ini adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah. dalam Islam juga diperintahkan setiap umatnya untuk senantiasa berinovasi.⁶⁹

Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam :

- a. Serba meliputi
- b. Berimbang
- c. Realistis
- d. Keadilan
- e. Bertanggung jawab
- f. Mencukupi
- g. Berfokus pada manusia.⁷⁰

D. Indeks Pembangunan Manusia

1. Konsep Pembangunan Manusia

Salah satu tujuan jangka panjang dari pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk mengejar ketertinggalan dari Negara maju. Meskipun

⁶⁸ Irfan Syauqi B. & Laily Dwi Arsyianti, *Op.Cit*, hlm. 23

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 24-27

⁷⁰ Nurul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 126-127

teknologi mempunyai peranan yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam pembuatan kebijakan pengembangan teknologi mesti mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.⁷¹

Sumberdaya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, daya dan karya. Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.⁷² Kemajuan teknologi, canggihnya mesin dan metode-metode kerja baru serta besarnya modal manusia tetap menjadi kedudukan sentral dan menentukan. Semuanya tetap memerlukan intervensi manusia yang mengendalikannya. Jadi manusia adalah pusat segalanya bagi suatu organisasi.⁷³

United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir pembangunan harus difokuskan pada manusia. Kondisi ini akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang lebih produktif.⁷⁴ Konsep pembangunan dan pembangunan manusia cukup berbeda. Dalam sudut pandang konvensional, pembangunan memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Model pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan pendapatan daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. Pembangunan sumber daya manusia cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan kesejahteraan

⁷¹ Mulyadi S., *Ekonomi Sumber Daya Manusia Perspektif Pembangunan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 236

⁷² Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 3

⁷³ Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 9

⁷⁴ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2014*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2015, hlm. 1

melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan kebutuhan dasar terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.⁷⁵

Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat, pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural – dari sudut pandang manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.⁷⁶ Sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai upaya serius dalam rangka meningkatkan kualitas manusia, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelegualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun aspek moralitas (iman dan takwa). Seluruh upaya pemerintah tersebut merupakan prasyarat penting untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas.⁷⁷

2. Pengertian Pembangunan Manusia

Konsep IPM mulai mendapat perhatian sejak laporan pertama yang dipublikasikan melalui UNDP melalui *Human Development Report* tahun 1990, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat,

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 7

⁷⁶ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2015*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2016, hlm. 8

⁷⁷ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2013*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2013, hlm. 5

tingkat pendidikan yang memadai dan standar hidup yang layak.⁷⁸ Pembangunan manusia pada dasarnya mempunyai empat komponen utama yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Produktivitas (*Productivity*)

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan (*Equity*)

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

c. Kesinambungan (*Sustainability*)

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan social harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

d. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan bentuk atau arah kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Melalui peningkatan keempat komponen tersebut secara maksimal maka pembangunan manusia akan dapat berhasil dengan baik, yang

⁷⁸ Edy Suandi Hamid, *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 85

dicirikan oleh peran manusia sebagai agen pembangunan yang efektif. Untuk mencapai hal itu maka penduduk suatu negara atau daerah paling tidak harus memiliki peluang berumur panjang dan sehat, memiliki tingkat pendidikan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif sehingga memiliki pendapatan yang cukup dan memiliki daya beli serta kemauan untuk melakukan konsumsi bagi pemenuhan kebutuhannya.⁷⁹

Indonesia belakangan ini juga banyak memanfaatkan IPM ini untuk melihat kemajuan nasional maupun daerah. Publikasi data IPM untuk Indonesia saat ini sudah sampai ke tingkat kabupaten/kota. Perhatian pada variabel indeks manusia ini sangat penting karena :

- a. Pembangunan pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia itu sendiri, sehingga aspek ini perlu mendapatkan prioritas anggaran
- b. Pembangunan manusia Indonesia saat ini masih tertinggal dibanding banyak Negara.
- c. Pengeluaran pemerintah yang dapat berpengaruh pada kualitas SDM, yakni untuk pendidikan dan kesehatan, porsinya sangat kecil, lebih rendah dari Negara lain.⁸⁰

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau dikenal dengan sebutan *Human Development Index* (HDI) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah.⁸¹ Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode

⁷⁹ Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta 2014, hlm. 217-218.

⁸⁰ Edy Suandi Hamid, *Op.Cit.*, hlm. 86-87

⁸¹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2014*, *Op.Cit.*, hlm. 10

dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut.⁸²

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau dikenal dengan sebutan *Human Development Index* (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi yakni derajat. IPM merupakan suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Apabila nilai IPM tinggi maka menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Berarti terdapat korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.⁸³

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.⁸⁴

Adapun formula yang digunakan dalam menyusun IPM ini adalah :

$$\text{IPM} = \frac{1}{3} (\text{indeks harapan hidup}) + \frac{1}{3} (\text{indeks pendidikan}) + \frac{1}{3} (\text{indeks daya beli})$$

⁸² Sussy Susanti, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel " ,STIE Bandung, Jurnal Matematika Integratif, Vol. 9 No. 1 ISSN 1412-6184, 2013, hlm. 5-6

⁸³ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Permasalahan Penting*, Ghalia Indonesia, Bogor, t.th., hlm. 167

⁸⁴ Sussy Susanti, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel " ,STIE Bandung, Jurnal Matematika Integratif, Vol. 9 No. 1 ISSN 1412-6184, 2013, hlm. 6

Angka harapan hidup adalah perkiraan tingkat usia rata-rata yang akan dicapai oleh penduduk dalam periode waktu tertentu. Semakin baik kondisi perekonomian dan pelayanan kesehatan di suatu Negara maka akan semakin tinggi pula angka harapan hidup masyarakat di Negara tersebut.⁸⁵

Indeks pendidikan menggabungkan dua indikator utama, yaitu rata-rata lama bersekolah dan tingkat melek huruf. Semakin tinggi nilai kedua indikator ini maka akan semakin baik pula nilai indeks pendidikannya. Sedangkan indeks daya beli ini merujuk pada standar hidup layak di suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan berapa sesungguhnya tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka mampu menjalankan kehidupan ini secara layak.⁸⁶

Skor IPM berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1 semakin tinggi nilai IPM-nya dan semakin berkualitas SDM yang dimiliki oleh suatu Negara. IPM ini oleh UNDP dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu:

- a. *Very High HDI* : untuk nilai IPM $\geq 0,800$
- b. *High HDI* : $0,700 \geq$ nilai IPM $< 0,800$
- c. *Medium HDI* : $0,550 \geq$ nilai IPM $< 0,700$
- d. *Low HDI* : nilai IPM $< 0,550$.⁸⁷

Secara umum, Negara-negara yang tergabung dalam kelompok *very high* HDI memiliki skor IPM rata-rata sebesar 0,890. Sedangkan mereka yang termasuk dalam *high* HDI, *medium* HDI, dan *low* HDI memiliki skor rata-rata IPM masing-masing sebesar 0,735, 0,614 dan 0,493. Meskipun konsep IPM ini belum menggambarkan kondisi SDM yang ideal, namun konsep inilah yang saat ini tersedia dan disepakati untuk digunakan sebagai perbandingan level pembangunan SDM

⁸⁵ Irfan Syauqi B. & Laily Dwi Arsyianti, *Op.Cit.*, hlm. 147

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 147

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 147-148

antarnegara di dunia.⁸⁸ Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan.

Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut :

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.⁸⁹

4. Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam

Menurut Muhammad Rawas Qal'ahji menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan Negara secara hakiki secara terus-menerus dalam wujud yang membolehkannya (kadar yang pantas) dan sesuai dengan kemajuan.⁹⁰

Manurut Ibn Khaldun untuk menciptakan kesejahteraan, maka setiap Negara harus melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga membuat sebuah lingkaran dengan daur keadilan. Komponen tersebut adalah kekuatan penguasa (*al-Mulk*), syariah (hukum), rakyat (*ar-rijal*), kekayaan (*al-Mal*), pembangunan (*al-imarah*), dan keadilan (*al-adl*). Semua variabel tersebut bekerja secara dinamis dan menjadi faktor yang menentukan kemajuan suatu Negara.⁹¹

Dalam Al-Qur'an pembangunan ekonomi dihubungkan dengan konsep *imarah al-ard* (memakmurkan bumi) yang terdapat pada QS. Hud (11): 61.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 148-149

⁸⁹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2014*, *Op.Cit.*, hlm. 10

⁹⁰ Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, hlm.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 248

﴿وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَّ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَلْيَتَّعَفَرُوا هُوَ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ٦١﴾

Artinya : Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"

Pemakmuran tanah mengandung pemahaman tentang pembangunan ekonomi. Beberapa pokok mengenai pembangunan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi.⁹²

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Negara yang kaya dengan sumber daya alam, tidak secara otomatis memberikan kemakmuran bagi warga masyarakatnya, jika sumber daya manusia tidak memiliki kemampuan (*skill*) dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sebaliknya, sebuah negara yang miskin akan sumber daya alam, namun memiliki kemampuan yang memadai akan lebih cepat berkembang dibandingkan negeri yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan ganda, baik sebagai objek dan subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan manusia SDM merupakan sasaran pembangunan untuk mendapat kesejahteraan, sedangkan sebagai subjek pembangunan, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan.⁹³

Terdapat tiga faktor atau indikator yang dijadikan tolak ukur oleh UNDP (*United Nation Depelopment Programme*) akan keberhasilan

⁹² *Ibid.*, hlm. 248

⁹³ Nurul huda dkk., *Op.Cit.*, hlm. 176

suatu pembangunan yaitu lamanya hidup (kesehatan), rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf (pendidikan), dan standar hidup (ekonomi), ketiga unsur ini pun mendapat perhatian yang cukup besar dalam Islam sebagai faktor penting dalam pembangunan manusia itu sendiri. Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual. Pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi.⁹⁴ Pembangunan sumber daya manusia yang secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses untuk pembangunan berkelanjutan.⁹⁵

Namun bagi Islam, faktor manusia lah yang lebih berperan dalam sebuah pembangunan. Tentu saja yang dimaksud oleh Islam adalah manusia yang berperilaku dengan akhlak Islam, manusia yang bebas dan merdeka, manusia dengan tauhid yang bersih. Semua hal ini dapat dicapai tentu saja melalui tarbiyah insaniyah itu sendiri. Pendidikan yang menyeluruh dan bukan sebagian saja.⁹⁶ Manusia merupakan elemen hidup dan pokok dari setiap program pembangunan. Mereka adalah tujuan sekaligus sebagai sasaran pembangunan, dan apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kepentingan dirinya tidak dilindungi dalam batas-batas kesejahteraan sosial, tidak mungkin akan berhasil mengaktualisasikan tujuan-tujuan pokok Islam dalam pembangunan.⁹⁷

⁹⁴ Karimatul Khasanah, "Hukum Ekonomi Syari'ah, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kapitalisme Global (Revitaformasi Hukum Ekonomi Pembangunan Islam)", Jurnal Kajian Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. IX Nomor 2, Desember 2015, hlm. 325

⁹⁵ Karimatul Khasanah, "Hukum Ekonomi Syari'ah, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kapitalisme Global (Revitaformasi Hukum Ekonomi Pembangunan Islam)", Jurnal Kajian Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. IX Nomor 2, Desember 2015, hlm. 326

⁹⁶ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 85

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 85-86

Upaya pembangunan manusia itu dapat dimulai dengan peningkatan kemampuan melalui pendidikan. Ilmu pengetahuan dan Islam dipandang sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang turut menyumbang kepada peningkatan dalam sektor pembangunan. Pembangunan adalah terikat secara langsung dengan perkembangan sumber manusia dimana pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan yang terdiri daripada pembangunan material, fisik dan spiritual. Sumber manusia yaitu tahap pendidikan dan ilmu yang ada merupakan salah satu modal dalam pembangunan Negara karena peningkatan yang berlaku dalam sumber manusia akan memberikan manfaat yang baik kepada pembangunan Negara. Faktor pendidikan menjadi salah satu indikator terpenting dalam menentukan tingkat pembangunan sebuah Negara. Begitu banyak ayat yang membicarakan akan keutamaan ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Az-Zumar ayat 9 sebagai berikut :

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ
٩

Artinya: “(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”⁹⁸

Demikian pula dengan kesehatan. Hanya manusia yang sehat jasmani yang mampu memberikan kemampuan terbaiknya untuk pembangunan. Jika kesehatan masyarakat terpenuhi maka akan berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan pembangunan secara keseluruhan karena kesehatan juga merupakan indikator kesejahteraan suatu Negara. Islam sangat

⁹⁸<http://djibran.staff.ipb.ac.id/2017/03/25/islam-dan-indeks-pembangunan-manusia/>
Ekonomi Syariah (30 Maret 2018)

memperhatikan kesehatan dalam semua aspek kehidupan manusia. Seperti larangan untuk mengkonsumsi makanan yang berbahaya sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَلَعْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزَلِّ لَمْ يَكُنْ فِسْقٌ الْيَوْمَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَأَحْسَنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
لِإِنِّمَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۳

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam Islam juga dijelaskan untuk mencari rezeki yang halal dan menyehatkan yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
۱۱۴

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.⁹⁹

⁹⁹<http://djibran.staff.ipb.ac.id/2017/03/25/islam-dan-indeks-pembangunan-manusia/>
Ekonomi Syariah (30 Maret 2018)

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagaimana tercantum dalam bagian studi pustaka yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, sebenarnya studi mengenai Upah Minimum Regional, pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia telah banyak dilakukan. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu. Berikut ini ringkasan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya :

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Jurnal	Metode	Hasil
1.	Ayunanda Melliana dan Ismaini Zain (2013)	Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel	Kuantitatif	Terdapat tujuh variabel yang berpengaruh signifikan terhadap IPM antara lain variabel rasio siswa terhadap guru (X1), angka partisipasi SMP/MTs (X3), jumlah sarana kesehatan (X4), persentase RT dengan akses air bersih, kepadatan penduduk (X6), tingkat partisipasi angkatan kerja (X7), dan PDRB perkapita (X8). ¹⁰⁰
2.	Mohammad Bintang P, Nurizal Ismail dan Indra (2015)	Determinan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Pendekatan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Al-Ghazali (Studi	Kuantitatif	Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Negara-negara

¹⁰⁰ Ayunanda Melliana dan Ismaini Zain, "Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel", Jurnal Sains dan Seni Pomits, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Vol. 2, No.2, 2013, hlm. 242

		Kasus: Negara-Negara Oki)	<p>OKI dengan analisis pendekatan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Al-Ghazali adalah: <i>Hifz 'Aql</i> yang diwakili Anggaran Pendidikan (%GDP) dengan hubungan yang positif, <i>Income Per Capita</i> (US\$) dengan hubungan yang positif dan Indeks Gini dengan hubungan yang negatif, dan masing-masing variabel berpengaruh signifikan pada taraf nyata 1%. Variabel yang memiliki signifikansi positif yang paling besar adalah <i>Income Per Capita</i> dengan 0.2161425, kemudian Anggaran Pendidikan (%GDP) dengan 0.0350796. Dan Variabel yang memiliki signifikansi negatif yang paling besar adalah Indeks Gini -0.241739.</p> <p>101</p>
--	--	---------------------------	---

¹⁰¹ Mohammad Bintang P dan Nurizal Ismail dan Indra, “*Determinan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Pendekatan Maqāṣid Syarī'ah Al-Ghazali (Studi Kasus: Negara-*

3.	Nur Baeti (2013)	Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011	Kuantitatif	<p>Variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien negatif sebesar 1,96 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2007 sampai 2011.</p> <p>Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,14 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2007 sampai tahun 2011.</p> <p>Variabel pengeluaran pemerintah yang dalam hal ini adalah pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien positif sebesar 4,60 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa</p>
----	------------------	--	-------------	---

Negara Oki”, Jurnal Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Tazkia Bogor, Volume 02, No. 2, November 2015, hlm. 531

				Tengah tahun 2007 sampai tahun 2011. ¹⁰²
4.	Nursiah Chalid dan Yusuf Yusbar (2014)	Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau	Kuantitatif	Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negative terhadap Indeks Pembangunan manusia (IPM) Masing-masing sebesar -0,163 dan -0,084. Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masing-masing sebesar 0,005 dan 0,953. Variable yang sangat besar pengaruhnya terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) adalah laju pertumbuhan ekonomi. ¹⁰³
5.	Nadia Ayu	Analisis Faktor-	Kuantitatif	PDRB

¹⁰² Nur Baeti, "Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011", *Economics Development Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang, ISSN 2252-6889, 2013, hlm. 94

¹⁰³ Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau", *Jurnal Ekonomi*, Universitas Riau, Volume 22 Nomor 2, 2014, hlm. 11-12

	Bhakti, Istiqomah, Suprpto (2014)	Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012	berpengaruh positif terhadap IPM di 33 provinsi di Indonesia. Rasio ketergantungan berpengaruh negatif terhadap IPM di 33 provinsi di Indonesia. APBD untuk pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di 33 provinsi di Indonesia. APBD untuk kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM di 33 provinsi di Indonesia. ¹⁰⁴
--	-----------------------------------	--	---

Penelitian Anggatia Ayunanda Melliana dan Ismaini Zain (2013) dengan judul “Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel”.¹⁰⁵ Perbedaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada beberapa variabel yang mempengaruhi IPM pada jurnal tersebut. Sedangkan untuk persamaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel PDRB yang mempengaruhi IPM.

¹⁰⁴ Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, dan Suprpto, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Volume 18, No. 4, 2014, hlm. 467

¹⁰⁵ Ayunanda Melliana dan Ismaini Zain, “Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel”, Jurnal Sains dan Seni Pomits, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Vol. 2, No.2, 2013, hlm. 242

Penelitian Mohammad Bintang P, Nurizal Ismail dan Indra (2015) dengan judul : “Determinan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* Al-Ghazali (Studi Kasus: Negara-Negara Oki)”.¹⁰⁶ Perbedaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada beberapa variabel yang digunakan. Sedangkan untuk persamaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan menguji variabel PDRB terhadap IPM.

Penelitian Nur Baeti (2013) dengan judul “Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011”.¹⁰⁷ Perbedaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada variabel pengangguran dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen. Sedangkan untuk persamaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kesamaan variabel independen yaitu variabel pertumbuhan ekonomi serta kesamaan menggunakan variabel IPM sebagai variabel dependen.

Penelitian Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014) dengan judul : “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau ”.¹⁰⁸ Perbedaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada variabel kemiskinan yang merupakan salah satu variabel independen. Selain itu yang membedakan adalah rentang waktu yang digunakan dalam penelitian.

¹⁰⁶ Mohammad Bintang P dan Nurizal Ismail dan Indra, “*Determinan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Pendekatan Maqāṣid Syarī'ah Al-Ghazali (Studi Kasus: Negara-Negara Oki)*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Tazkia Bogor, Volume 02, No. 2, November 2015, hlm. 531

¹⁰⁷ Nur Baeti, “*Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*”, Economics Development Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, ISSN 2252-6889, 2013, hlm. 94

¹⁰⁸ Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, “*Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*”, Jurnal Ekonomi, Universitas Riau, Volume 22 Nomor 2, 2014, hlm. 11-12

Sedangkan untuk persamaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan variabel IPM sebagai variabel dependen.

Penelitian Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, Suprpto (2014) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012”.¹⁰⁹ Perbedaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek yang digunakan dalam penelitian, pada jurnal tersebut penelitian dilakukan dengan objek seluruh provinsi di Indonesia tetapi pada penelitian ini objek yang digunakan untuk penelitian hanya di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk persamaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kesamaan pembahasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹¹⁰ Kerangka berfikir adalah gambaran pemikiran peneliti atas masalah yang akan atau sudah diteliti, atau merupakan ulasan terhadap teori-teori yang telah ditemukannya dalam tinjauan pustaka, kerangka teori atau tinjauan teoritis. Artinya apa-apa yang dikemukakan peneliti dalam kerangka pemikiran tersebut, tidak lagi mengungkapkan atau mengutip teori atau pandangan para pakar di bidang yang akan diteliti.¹¹¹ Untuk itu agar lebih memperjelas tentang arah dan tujuan dari penelitian secara utuh, maka perlu diuraikan suatu konsep berfikir dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menguraikan

¹⁰⁹ Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, dan Suprpto, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Volume 18, No. 4, 2014, hlm. 467

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 60

¹¹¹ Toto Syatori Nasehuddin & Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.101

gambaran tentang UMR, pengangguran, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 01/MEN/1999 bab I pasal 1 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum yang berlaku sektoral di daerah Kabupaten/Kotamadya menurut wilayah pembangunan daerah disebut dengan upah minimum sektoral regional tingkat II. Upah minimum ditetapkan berdasarkan standar layak hidup dengan memperhatikan produktivitas pertumbuhan ekonomi.¹¹²

Menurut Sadono Sukirno pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sedangkan seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak digolongkan sebagai penganggur. Pengangguran juga dapat memberikan dampak sosial yang tidak baik misalnya semakin meningkatnya tindakan kriminal dan pelanggaran moral.¹¹³

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.¹¹⁴

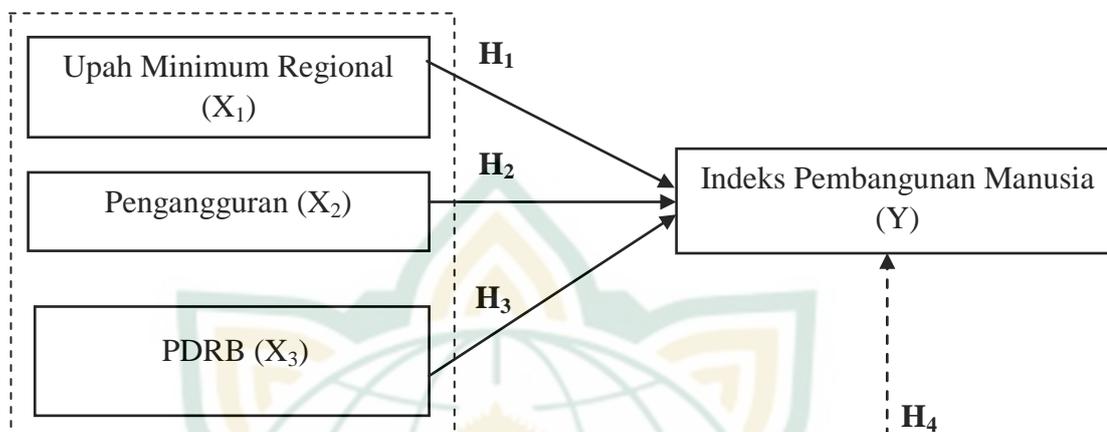
Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel. Untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, maka digambarkan model penelitian sebagai berikut :

¹¹² Joni Bambang, *Loc.Cit.*

¹¹³ Nur Baeti, *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*, Economics Development Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, ISSN 2252-6889, 2013, hlm. 92

¹¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Jawa Tengah 2011-2015*, *Loc.Cit.*

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- = Uji secara parsial
 - - - - - = Uji secara simultan

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah penelitian mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Hipotesis secara etimologis dibentuk dari dua kata, yaitu kata *hypo* dan kata *thesis*. *Hypo* berarti kurang dan *thesis* adalah pendapat. Yang dapat diartikan sebagai suatu arti kesimpulan yang masih kurang dan masih belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu. Pembuktian itu dapat dilakukan dengan menguji hipotesis dengan data lapangan. Penelitian menggunakan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Dengan hipotesis penelitian tidak akan mengambang, karena dibimbing oleh hipotesis tersebut.¹¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

¹¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 90

1. Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap IPM

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Untuk melindungi para buruh pemerintah menentukan Undang-Undang suatu tingkat upah minimum yang boleh dibayar oleh pengusaha kepada pekerjanya.¹¹⁶ Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Upah Minimum pasal 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum yang berlaku sektoral di daerah Kabupaten/Kotamadya menurut wilayah pembangunan daerah disebut dengan upah minimum sektoral regional tingkat II.¹¹⁷ Upah Minimum Regional (UMR) ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL), indeks harga konsumen, upah minimum yang berlaku secara regional kemampuan dan tingkat perkembangan perusahaan.¹¹⁸

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Tujuan penetapan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan dan meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah. Selain itu tujuan penetapan upah minimum yaitu untuk pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya. Oleh karena itu, upah minimum regional menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah / daerah.¹¹⁹

184 ¹¹⁶ Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.

¹¹⁷ Joni Bambang, *Op.Cit.*, hlm. 172

¹¹⁸ Suparmoko, *Op.Cit.*, hlm. 185

¹¹⁹ Syahrina Syam dan Abdul Wahab, *Pengaruh Upah dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar*, No.1, Vol. 1, 2015, hlm. 38

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014), terbukti bahwa Upah Minimum Regional kabupaten/kota berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Tengah dari persepektif Ekonomi Syariah.

2. Pengaruh Pengangguran terhadap IPM

Pengangguran merupakan salah satu masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan hampir ada di setiap Negara. Pada dasarnya pengangguran tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena sebaik dan hebatnya suatu Negara maupun daerah dalam menangani perekonomiannya, tetap saja pengangguran itu ada. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan.¹²⁰

Menurut Sadono Sukirno pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sedangkan seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak digolongkan sebagai penganggur. Pengangguran juga dapat memberikan dampak sosial yang tidak baik misalnya semakin meningkatnya tindakan kriminal dan pelanggaran moral.¹²¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Baeti (2013) terbukti bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan

¹²⁰ Iskandar Putong, *Op., Cit.*, hlm. 426

¹²¹ Nur Baeti, *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*, Economics Development Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, ISSN 2252-6889, 2013, hlm. 92

terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengangguran juga berkaitan erat dengan kualitas pembangunan manusia. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan kemakmuran kehidupan masyarakat berkurang. Pengangguran juga mengakibatkan pendapatan mereka berkurang. Pendapatan dalam hal ini merupakan faktor yang dominan dalam peningkatan pembangunan manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Terdapat pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Tengah dari persepektif Ekonomi Syariah.

3. Pengaruh PDRB terhadap IPM

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan.¹²²

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau

¹²² Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, *Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*, Jurnal Ekonomi, Universita Riau , No. 2, Vol. 22, 2014, hlm. 3

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.¹²³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, Suprpto (2012) terbukti bahwa PDRB memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 33 Provinsi Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : Terdapat pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Tengah dari persepektif Ekonomi Syariah.

4. Pengaruh UMR, Pengangguran, dan PDRB terhadap IPM

Konsep pembangunan manusia menurut definisi UNDP adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (*people's choice*). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu panjang umur dan sehat, berpendidikan dan standar standar hidup yang layak. Selain itu, menurut Ginting pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan diatas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi.¹²⁴

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat, angka melek huruf, dan rata-rata lamanya sekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan serta kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita, dan tingkat hidup yang layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga

¹²³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Jawa Tengah 2011-2015, Loc.Cit.*

¹²⁴ Nur Baeti, *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*, Economics Development Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, ISSN 2252-6889, 2013, hlm. 91

dipengaruhi oleh banyak faktor terutama faktor-faktor sosial ekonomi.¹²⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014), terbukti bahwa Upah Minimum Regional kabupaten/kota berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan pengangguran berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₄ : Terdapat pengaruh UMR, Pengangguran, dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Tengah dari persepektif Ekonomi Syariah.

¹²⁵ Nur Feriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 218